

Dimensi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat di Wilayah Pesisir

Willya Achmad

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Email: willyaachmad@unpas.ac.id

Abstrak

Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya masih banyak masyarakat pesisir yang hidup dalam keterbelakangan dan jauh dari kata sejahtera, seperti halnya kawasan pesisir pantai Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun penggunaan kualitatif didasarkan pada fungsinya yang sangat relevan khususnya dalam mengevaluasi dan memahami kondisi suatu kelompok masyarakat, dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, rendahnya pendapatan masyarakat pesisir Pangandaran yang berdampak pada kemiskinan disebabkan karena tidak stabilnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan, serta didukung pula oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai dan lemahnya sumber daya manusia yang ada, melalui berbagai program yang telah di galakan oleh pemerintah setempat dalam beberapa tahun terakhir ini, seyogyanya diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan para nelayan yang ada di kawasan pesisir pantai Pangandaran. Karena sejatinya kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dimungkinkan apabila pendapatan penduduk mengalami kenaikan yang cukup hingga mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupannya. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya tersedia dan mudah dijangkau oleh setiap penduduk sehingga pada gilirannya dapat mengurangi beragam beban hidup masyarakat pesisir secara penuh.

Kata Kunci: Dimensi Sosial, Pengembangan Masyarakat, Wilayah Pesisir



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah sejatinya adalah upaya membangun dan mengembangkan suatu kondisi dan keadaan wilayah yang didasarkan pada pendekatan spasial dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting di dalamnya meliputi, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan fisik dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan (Damanik & Amin, 2019). Adapun salah satu ruang yang memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan wilayah adalah kawasan pesisir dan laut. Wilayah pesisir memiliki sumber daya alam yang beragam, baik itu dalam hal sumber daya yang dapat diperbaharui maupun sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu wilayah ini juga memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti transportasi, pelabuhan, industri, permukiman, dan pariwisata (Indarti & Kuntari, 2015; Achmad & Yulianah, 2022).

Menurut Kristiyanti (2016) pada dasarnya kawasan pesisir bukan semata-mata tempat peralihan antara ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus titik temu antara aktifitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan laut, serta merupakan tempat pendaratan berbagai sumberdaya laut maupun aliran sumberdaya lainnya untuk kemudian dialirkan ke daratan. Secara historis, kawasan pesisir telah menjadi hamparan konsentrasi berbagai kota-kota pelabuhan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi global, karena pada hakekatnya masyarakat di kawasan pesisir memang sering di fungsikan sebagai kontrol terhadap pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan.

Sedangkan dalam jurnal Kurniasari & Reswati (2011) masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang sangat populer dengan berbagai aktivitas kelautannya dan berprofesi sebagai nelayan ikan. Secara sosio kultural masyarakat pesisir juga memiliki nilai yang sangat strategis apabila dibangun dengan perpaduan antara budaya maritim laut, pantai dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduknya. Namun jika melihat paradigma yang ada, masyarakat pesisir ternyata selalu di posisikan pada kumpulan orang-orang yang hidup dalam berbagai kekurangan, misalnya akses pendidikan kurang, tingkat kebodohan tinggi, kawasan yang kumuh, serta nilai pendapatan penghasilan yang tidak mencukupi. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat kawasan pesisir memiliki sumber kekayaan alam yang tidak terhingga, apabila mampu di kembangkan dengan sebaik-baiknya (Nurhayati, 2012).

Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir yang berdampak pada struktur kehidupan mereka, nyatanya di akibatkan oleh beberapa aspek pendukung misalnya tidak stabilnya hasil tangkapan ikan yang didapat, kurangnya sarana dan prasarana yang ada, sumber daya manusia yang kurang, serta struktur armada penangkapan yang masih didominasi usaha kecil/tradisional dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah. Bahkan pendapat lain menyebutkan bahwa, jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, profesi nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun pada kenyataannya tidak dapat dikatakan semua nelayan itu hidup dalam garis kemiskinan.

Menurut hasil penelitian Qodriyatun (2013) pembangunan masyarakat pesisir merupakan salah satu usaha yang sudah lama dicanangkan oleh pemerintah melalui berbagai program dan anggaran dalam skala pembangunan nasional berkelanjutan. Karena selama ini fokus pembangunan di negara Indonesia selalu di upayakan pada wilayah daratan dan lebih khusus di arahkan pada kawasan sektor industri berat. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2015, jumlah kemiskinan di daerah pesisir mencapai 32,14% dari total jumlah penduduk miskin nasional, sementara jumlah penduduk miskin nasional menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015 mencapai 28,59 juta orang, maka dapat kita ketahui bahwa data kemiskinan di daerah pesisir pada tahun 2015 mencapai 7,18 juta orang.

Disamping itu negara Indonesia juga kaya akan keanekaragaman lautnya yang bisa dilihat dari kondisi geografis, dimana terdiri dari ribuan pulau yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan laut, selat dan teluk serta daratan yang didalamnya terdapat kandungan air tawar dalam bentuk sungai, danau, rawa, dan waduk. Dengan luasnya perairan Indonesia tersebut, membuat masyarakat terdorong untuk membentuk pemukiman baru disekitar atau dipinggiran laut demi memanfaatkan sumber daya yang ada. Secara tidak sengaja perspektif ini memberikan identitas tersendiri bagi seluruh masyarakat pesisir dimana kelompok ini terbentuk atas struktur sosial sendiri, serta memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing, seperti halnya masyarakat desa pesisir pangandaran (Rachmanzah dkk., 2014; Ilhami & Achmad, 2022).

Menurut hasil penelitian Rahim dkk., (2014) pantai Pangandaran adalah salah satu tempat obyek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, pantai ini merupakan wilayah pesisir serta berbatasan langsung dengan laut lepas, sehingga pantai Pangandaran memiliki kekayaan alam yang cukup besar, karena sebagian masyarakat yang tinggal disana bekerja sebagai nelayan. Akan tetapi pada kenyataannya, kesejahteraan masyarakat di kawasan Pantai Pangandaran dinilai masih kurang, hal ini dapat dilihat dari kemampuan nelayan yang tingkat pemanfaatan kekayaan lautnya hanya 15% dari total potensi kekayaan laut yang ada. Sebagian masyarakat di kawasan Pantai Pangandaran belum dapat memaksimalkan potensi perikanan yang ada dikarenakan keterbatasan sarana dan

kemampuan atau skill yang dimilikinya. Selain itu masalah lain yang dihadapi oleh nelayan di Pantai Pangandaran yaitu pendeknya musim panen yang hanya berkisar enam bulan, sedangkan bulan lainnya merupakan musim paceklik dan berimbas pada perekonomian nelayan di kawasan Pantai Pangandaran (Sabarisman, 2017).

Saat ini masih banyak nelayan di kawasan Pantai Pangandaran yang hidup dalam kategori miskin, penghasilan yang didapat pun tergolong kecil serta tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut hasil penelitian Sarinah et al., (2019): "Selain budaya konsumtif, kecilnya pendapatan telah menyebabkan mereka terjatuh dalam lingkaran hutang yang sangat pelik". Hal lain yang menyebabkan masyarakat Pangandaran masih hidup dalam kesulitan adalah, rendahnya sumber daya manusia dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, sehingga sangat berdampak pada penghasilan yang mereka dapatkan.

Adapun pengeluaran terbesar masyarakat pantai Pangandaran, digunakan untuk melunasi hutang, belanja kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya sekolah. Selain itu diketahui bahwa, masyarakat miskin pesisir Pangandaran perlu diberdayakan sedemikian rupa, dimulai dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, meningkatkan pengetahuan, pemenuhan kualitas kesehatan, dan pelatihan aktualisasi diri yang mumpuni sehingga mereka tidak bergantung pada satu pekerjaan saja. Di sisi lain penduduk di wilayah pesisir pantai memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah, dimana pada musim barat, sebagian nelayan tidak melaut dan sebagian besar dari mereka hanya mengantungkan hidupnya pada ikan di laut. Dengan melihat hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan upaya pengembangan mata pencaharian alternatif sebagai salah satu cara yang harus diprioritaskan (Yalia, 2015).

Untuk mengurangi dampak dari beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh kelompok pesisir pantai Pangandaran, pemanfaatan modal sosial yang ada pada masyarakat dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan perekonomian nelayan. Modal sosial merupakan modal yang paling mudah diakses oleh masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan. Namun sistem sosial masyarakat yang menjadi obyek pembangunan ini sering terabaikan. Akibatnya masyarakat tidak memahami dan tidak dapat memanfaatkan modal sosial secara maksimal, padahal pemanfaatan modal sosial ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu kawasan. Pemanfaatan dan penguatan modal sosial yang ada pada masyarakat kawasan Pantai Pangandaran dapat dijadikan sebuah strategi untuk meningkatkan perekonomian nelayan di kawasan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai kelanjutan dari road map penelitian terhadap kondisi kehidupan yang ada di kawasan pesisir. Maka penelitian ini berjudul dimensi sosial dalam pengembangan masyarakat di wilayah pesisir.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan analisis deskriptif sebagai metode penelitian, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun menurut Soendari (2012) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Sementara itu menurut Gunawan, I (2002) penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat metode post positivisme dengan kondisi obyek yang natural, dengan menempatkan peneliti sebagai alat atau instrument kecil. Strategi kualitatif dipilih dengan pengertian bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan untuk mendalami masalah penelitian guna memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian

dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan pemerintah adalah suatu upaya yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat ekonomi partisipatif serta mampu memberikan akses yang adil bagi sebuah lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan memanfaatkan potensi daerah tanpa ada hambatan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini melalui kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi, sehingga masyarakat nelayan yang ada di daerah tersebut khususnya maupun masyarakat pada umumnya dapat meningkatkan perekonomiannya di masa mendatang. Pemberdayaan masyarakat yang terjadi di kawasan pesisir pangandaran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh nelayan yang ada di kawasan pesisir pantai pangandaran yang dianggap masih rendah dan tertinggal (Anwar, 2013). Melalui berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah kepada nelayan Pangandaran, baik program dari kementerian kelautan dan perikanan maupun program dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup para nelayan.

Adapun program pemberdayaan tersebut digulirkan dalam dua jenis, yaitu bantuan peningkatan produktifitas penangkapan ikan, dimulai dari bantuan motorisasi, bantuan alat penangkapan, bantuan kapal besar dan bantuan lainnya sementara jenis bantuan yang kedua dengan melakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan untuk memanfaatkan potensi pariwisata di Desa Pangandaran supaya tidak terlalu tergantung dengan melaut sehingga pada saat musim paceklik nelayan memiliki kemampuan dan keterampilan lain yang mampu menghasilkan pendapatan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Pangandaran sebenarnya sudah di anggarkan sejak lama dalam rangka meningkatkan taraf hidup para nelayan yang ada disana, namun dengan banyaknya bantuan tersebut membuat para nelayan menjadi ketergantungan, malas dan termanjakan yang akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan nelayan tidak mengalami peningkatan, untuk mengantisipasi ketergantungan tersebut dalam melaksanakan program pemberdayaannya pemerintah selalu melibatkan seluruh nelayan yang ada disana untuk berdiskusi dan menjalin kerja sama agar kedepannya program-program yang telah dijalankan dapat bersinergi dengan baik, berkelanjutan serta menjamin kesejahteraan kelompok pesisir yang ada di kawasan Pantai Pangandaran, selain itu para nelayan juga dilibatkan dalam penentuan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan (Juliarso et al., 2021).

Selain Program pemberdayaan nelayan pemerintah juga memberikan jaminan asuransi jiwa khusus untuk nelayan sehingga nelayan di Pangandaran tidak merasa was was dan harus merasa bangga dengan profesi nelayan. Program pemberdayaan nelayan merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, sehingga ketika program pemberdayaan nelayan berjalan maka tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Pangandaran akan meningkat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Pemberdayaan Nelayan di kawasan pantai Pangandaran maka dapat dilihat dari penilaian Implementasi Program yang telah dijalankan selama ini, salahsatunya dapat diukur melalui faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Septiadi, 2019).

Adapun komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga kenelayanan sebagai pemberi kebijakan program pemberdayaan nelayan belum dilakukan secara maksimal, komunikasi dilakukan hanya pada saat acara resmi seperti sosialisasi, dan diskusi, sementara nelayan tidak berani menyampaikan pertanyaan pada saat acara resmi, nelayan lebih berani

berkomunikasi langsung diluar acara resmi. Implementasi pemberdayaan nelayan di kawasan pesisir Pantai Pangandaran apabila dilihat dari faktor sumber daya manusia, yaitu nelayan belum memiliki keahlian dan keterampilan yang mumpuni dan harus ditingkatkan terlebih dahulu supaya kebijakan pemberdayaan nelayan bisa dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran, walaupun tingkat kesadaran dan partisipasi nelayan terhadap program pemberdayaan nelayan bisa dikatakan sudah cukup baik, begitupun dengan keterlibatan beberapa lembaga pemerintah yang ada disana beregrak secara aktif dan antusias serta terus mengupayakan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan.

Di sisi lain implementasi pemberdayaan nelayan di kawasan pantai Pangandaran dilihat dari faktor disposisi dengan model keberlanjutan nyatanya belum dilakukan secara maksimal, pemanfaatan potensi untuk keberlanjutan suatu kebijakan yang terjadi menyebabkan ketegantungan dan seakan akan memanjakan para nelayan yang ada disana, tentunya pihak pemerintah selaku pemberi program harus bisa memfasilitasi dan memberikan solusi terbaik dalam hal peningkatan penghasilan yang nantinya dapat dimaksimalkan dengan tepat oleh seluruh kalangan masyarakat pesisir Pangandaran. Selain itu perlunya koordinasi dan komunikasi yang lebih terstruktur dalam melakukan pendataan yang menyeluruh dimulai dari tingkat Rukun Nelayan hingga tingkat dinas supaya bantuan yang digulirkan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada disana pelan-pelan mulai dapat direalisasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa Program Pemberdayaan seperti, Usaha Mina Perdesaan (PUMP), Pembangunan Koperasi Nelayan, Kedai Pesisir atau Klinik Bisnis, Pembangunan solar, packed, dealer, untuk nelayan (SPDN), Pembangunan Pasar Ikan Segar (Cold Storage), Pembangunan Dermaga Perikanan, Pembangunan Balai Kelompok Nelayan, Pembangunan Pabrik Es, Pembangunan Break Water, dan program yang mengacu pada pengembangan kapasitas nelayan seperti Pembangunan Learning Center, Bimbingan Teknis, Regenerasi Nelayan, serta Peningkatan Nilai Tukar dimana semua program-program ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir diharapkan dapat meningkat secara pesat.

Namun bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diterapkannya berupa sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan tangkap seperti perahu, kapal motor dan peralatan penangkapan ikan masih mencapai sebagian kecil nelayan yang ada, hal ini tentunya dapat menghambat proses pemberdayaan yang ada, kemudian terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidang perikanan membuat para nelayan menjadi kurang kreatif dalam mengembangkan setiap usahanya, maka sejatinya peran pemerintah disini sangat dibutuhkan dan terus bergerak dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia agar kedepannya standar hidup kawasan pesisir Pangandaran dapat meningkat dan tumbuh menjadi kelompok masyarakat yang mandiri khususnya dalam mengelola setiap kekayaan laut yang ada di kawasan Pantai Pangandaran. Akibat dari keterbatasan modal dan fasilitas yang dimiliki serta sumber daya manusia yang kurang maka, hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan belum mencapai hasil yang maksimal sehingga tidak dapat memberikan keuntungan yang memadai ditambah lagi kadang-kadang karena cuaca buruk yang menghambat aktivitas penangkapan ikan di laut.

Seperti yang sudah disampaikan diatas bahwasannya kelompok masyarakat pesisir Pantai Pangandaran memiliki beberapa institusi atau kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pengembangan kapasitas nelayan, seperti KUB yaitu

organisasi yang dibentuk untuk membuka usaha dari masing-masing kelompok. KUB ini bergerak dalam bidang penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran hasil perikanan. Para nelayan yang ada di Desa Pangandaran akan dibagi menjadi beberapa KUB. Di Desa Pangandaran terdapat 87 KUB dengan rata-rata jumlah anggota per KUB yaitu 10 orang. KUB ini juga bertujuan untuk mempermudah proses penyaluran bantuan-bantuan dari pemerintah atau swasta yang ditujukan untuk nelayan (Aidawati, 2021).

Kemudian Rukun Nelayan, yaitu organisasi yang menjadi penghubung antara KOMDA dan KUB dengan KUD dan HNSI yang ada di wilayah Desa Pangandaran. Rukun nelayan mempunyai tugas untuk menerima dan menyampaikan aspirasi, keluhan nelayan kepada organisasi yang berada di atasnya. Kemudian adalah HNSI, yaitu organisasi masyarakat berbasis nelayan yang telah diformalkan pemerintah. HNSI lebih fokus kepada program pembinaan dan pemberdayaan nelayan. Sejatinya dengan hadirnya beberapa institusi yang dijalankan oleh masyarakat sekitar kawasan pesisir Pantai Pangandaran tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup serta memberdayakan masyarakat yang ada disana untuk dapat hidup secara mandiri dan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang ada di kawasan Pantai Pangandaran. Karena makna asli dari pemberdayaan masyarakat merupakan pembangunan berbasis komunitas yang sudah seharusnya menjadikan keterlibatan masyarakat sebagai aspek utamanya, dimana konsep pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadi solusi terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pesisir yang sesungguhnya.

Dimensi Sosial Keadaan Masyarakat Pesisir Pantai Pangandaran

Sebagian besar wilayah di Indonesia adalah terdiri dari lautan dan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, maka dengan segala hasil laut yang dimiliki tersebut seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan pada umumnya. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kondisi ini sering diidentikkan dengan kelompok tertinggal dimana tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, seperti buruh pabrik, dan petani. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai yang sebagian besar merupakan nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitan erat dengan karakteristik ekonomi wilayah, latar belakang budaya dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Masyarakat pesisir (nelayan) dapat di pandang sebagai suatu lingkungan hidup dari satu individu atau satu keluarga nelayan. Dengan kata lain masyarakat nelayan dibentuk oleh sejumlah rumah tangga nelayan dan tiap rumah tangga merupakan lingkungan hidup bagi yang lainnya. Selain itu tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya ketika mereka sedang berburu ikan. Adapun banyaknya tangkapan ikan tercermin pula pada besaran pendapatan yang diterima, dimana sebagian besar hasil bayarnya di habiskan untuk keperluan hidup sehari-hari atau kebutuhan fisik minimum (Marfai dkk, 2018). Keadaan tersebut tidak jauh dengan kondisi masyarakat pesisir di wilayah Pantai Pangandaran, dimana sebagian besar masyarakatnya masih hidup dalam garis kemiskinan dan kekurangan.

Pangandaran merupakan wilayah pesisir di sekitar pantai selatan Jawa yang memiliki bentang pantai sepanjang 7 km. Pada bagian utara Desa Pangandaran berbatasan langsung dengan Desa Babakan, pada bagian selatan desa Pangandaran berbatasan dengan Samudera Hindia, pada bagian barat berbatasan langsung dengan Desa Pananjung dan pada bagian timur berbatasan langsung dengan wikayah Samudera Indonesia. Desa Pangandaran merupakan salah satu desa di Indonesia yang merupakan desa pesisir. Sehingga bisa kita

simpulkan Desa Pangandaran ini adalah Desa yang memanfaatkan keragaman hayati di wilayah perairan, yaitu laut, di Indonesia, sebagai sebuah Desa yang memanfaatkan keragaman hayati laut, nelayan menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat desa Pangandaran, dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan keragaman hayati tersebut diperlukannya bantuan dari pemerintah untuk membantu pengelolaan dan pemanfaatan sumber dan keragaman hayati yang ada.

Pada dasarnya kehidupan masyarakat nelayan adalah keadaan nyata yang dapat diungkapkan melalui usaha mereka yang dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, kondisi alam tidak menunjang, terbatasnya modal dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan keadaan sosial ekonomi lemah. Selama ini berbagai pendapat tentang nelayan telah berkembang dan sudah menjadi bagian dari perdebatan publik. Perdebatan yang telah berkembang antara lain menyangkut tentang masalah gaya hidup nelayan yaitu penggunaan uang atau pendapatan mereka yang pada masa panen ikan sering sekali membelanjakannya tanpa mempertimbangkan jika suatu saat musim ikan berakhir atau pada masa paceklik datang. Dalam kehidupan masyarakat nelayan fenomena yang terjadi adalah mereka seringkali membelanjakan pendapatannya ketika musim ikan datang, jadi ketika musim panen tiba maka saat itulah para nelayan benar-benar menikmati hasil dari tangkapannya. Kepuasan tersebut pada dasarnya mengenyampingkan dampak dari hasil yang diperoleh nantinya ketika barang tersebut akan dijual kembali, yaitu barang yang dijual akan mengalami penurunan harga sehingga nelayan akan mengalami kerugian.

Desa Pangandaran merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di wilayah pantai Selatan Pulau Jawa, adapun wilayah Pangandaran terbagi menjadi 3 desa yaitu Desa Pangandaran Timur, Desa Pangandaran Barat dan Desa Parapat. Ada sekitar 46 Rukun Tetangga yang tersebar di 3 desa di Pangandaran. Pangandaran dihuni oleh penduduk yang mayoritas berasal dari suku Jawa dan Sunda, sedangkan untuk masyarakat pendatang biasanya berasal dari daerah Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk sekitar 9.240 jiwa. Wilayah Pangandaran merupakan wilayah pesisir yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pada masyarakat pesisir sering terjadinya perubahan struktur sosial, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti masuknya unsur-unsur pembentuk struktur dari luar (individu, sistem), atau karena meningkatnya akses masyarakat terhadap perubahan di lingkungan lokal, misalnya sektor pertanian di hutan, pariwisata, atau pengolahan produk perikanan. Perubahan struktur sosial tersebut juga berlaku pada masyarakat nelayan di wilayah Pangandaran dikarenakan wilayah pesisir Pangandaran memiliki potensi dalam segala bidang ekonomi seperti wisata, kerajinan dan sebagainya (Nursetiawan & Putra, 2021).

Penduduk desa Pesisir Pangandaran tentunya sangat identik dengan mata pencaharian sebagai nelayan sehingga terdapat dua kelompok nelayan berdasarkan tingkatannya, pada masyarakat nelayan Pangandaran terdapat pembagian kelompok nelayan, yaitu nelayan pemilik atau biasa dipanggil juragan dan nelayan buruh atau biasa disebut anak buah kapal. Nelayan pemilik atau juragan merupakan nelayan yang memiliki segala sarana dan prasarana untuk menangkap ikan seperti perahu, alat selam, alat tangkapan ikan dan sebagainya, nelayan pemilik di Pangandaran terkadang memantau aktivitas laut didaratkan karena segala pekerjaan melautnya diserahkan kepada ABK atau Jonggol. Sedangkan Nelayan buruh atau ABK merupakan nelayan yang tidak memiliki sarana dan prasarana dalam melakukan aktivitas melaut sehingga nelayan buruh hanya bisa menggunakan tenaga saja dalam melakukan aktivitas melautnya.

Selain itu terdapat pula pengelompokan baru di wilayah pesisir Pangandaran yaitu kelompok nelayan pariwisata dan kelompok nelayan non-pariwisata, dimana nelayan

pariwisata merupakan nelayan yang bekerja dibidang pariwisata dengan cara memenuhi segala sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk wisatawan seperti menyewakan perahu, penginapan, sarana olahraga dan hiburan air. Sedangkan nelayan non-pariwisata merupakan nelayan yang berfokus pada pekerjaan mencari ikan dilaut tanpa mencampuri kegiatan wisata yang ada. Berkembangnya bidang pariwisata pesisir Pangandaran tidak membuat jumlah nelayan pemilik atau juragan meningkat, hal tersebut malah berdampak sebaliknya dengan berkembangnya bidang pariwisata membuat banyak penduduk dari luar wilayah Pangandaran datang ke Pangandaran demi merasakan dampak dari kegiatan pariwisata tersebut.

Di sisi lain kita sering menganggap bahwa masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi tertinggal. Selain itu banyak dimensi kehidupan lainnya yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu dibalik kemarginalannya masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Sidiq dkk (2021) Masyarakat pesisir Pangandaran masih tergolong kedalam nelayan tradisional, karena peralatan menangkap ikan yang digunakan masih terbilang sangat sederhana, dimana para nelayan masih menggunakan perahu yang dilengkapi motor tempel dengan kapasitas memuat hanya empat orang saja. Sedangkan untuk alat tangkap yang biasa digunakan adalah jaring insang, alat pancing, jaring angkat, sirang, dan bagang, maka dengan peralatan tangkap yang terbatas tersebut area penangkapan ikan juga turut berpengaruh yakni hanya sekitar 3 – 5 mil dari bibir pantai.

Dari Hasil penelitian menjelaskan bahwa daerah sekitaran penangkapan ikan yang menjadi tujuan nelayan pesisir pangandaran yaitu mulai dari Teluk Pangandaran sampai perairan Nusa Kambangan, bahkan bisa sampai ke daerah Cilacap. Waktu yang dibutuhkan nelayan untuk sampai ke lokasi penangkapan ikan sekitar 1 sampai 2 jam. Para nelayan Desa Pangandaran biasanya berangkat melaut sekitar pukul 02.00 WIB dan kembali ke darat kurang lebih pada pukul 11.00 WIB. Adapun besaran modal yang diperlukan nelayan untuk menangkap ikan berkisar antara Rp 200.000 – Rp 300.000, termasuk membeli bahan bakar dan perbekalan selama melaut. Nelayan di Desa Pangandaran tidak menggunakan alat bantu dalam menentukan lokasi penangkapan ikan, para nelayan biasanya menggunakan insting dan ciri-ciri perairan sekitar berdasarkan pengalamannya. Dengan peralatan yang masih sederhana, potensi sumberdaya perikanan yang ada disekitar Pangandaran belum dimanfaatkan dengan maksimal. Nelayan Pangandaran baru dapat memanfaatkan 19,9% dari total potensi lestari, yaitu sebesar 15.486 ton/tahun.

Selain itu tingkat partisipasi masyarakat nelayan di wilayah Desa Pangandaran dalam institusi atau kelembagaan sosial nelayan sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan masuknya semua nelayan sebagai anggota salah satu kelembagaan sosial yang ada. Di sisi lain tingkat kepedulian sosial antar nelayan di desa Pangandaran terbilang sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari kepedulian nelayan jika salah satu nelayan ada yang mempunyai masalah, maka nelayan lain pasti akan membantu. Begitupun dengan adanya modal sosial yang ada di masyarakat Desa Pangandaran dimana seluruh modal tersebut telah dimanfaatkan pada sektor penguatan ekonomi atau kesejahteraan nelayan, namun sebagian juga dialokasikan untuk peningkatan kapasitas nelayan (Wijaya, 2016). Sikap kerukunan antar nelayan di Desa Pangandaran dijaga dengan baik, masyarakat sangat menjunjung tinggi sifat kekeluargaan, hal ini dapat dibuktikan dari minimnya konflik antar nelayan yang ada di kawasan pesisir Pantai Pangandaran dan sekalipun jika terjadi konflik maka proses tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus masuk ke ranah hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti mendapatkan hasil bahwa pada struktur sosial masyarakat nelayan Pangandaran terdapat adanya pengelompokan masyarakat atau stratifikasi masyarakat yang mana pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat kekayaan yang dimiliki individu. Selain itu terdapat pula pengelompokan baru di wilayah pesisir Pangandaran yaitu kelompok nelayan pariwisata dan kelompok nelayan non-pariwisata, dimana dari keduanya memang memiliki karakter tersendiri namun tetap saling membantu satu sama lain. Adapun untuk menanggulangi beberapa permasalahan yang sering timbul di kalangan masyarakat pesisir pantai Pangandaran, pemerintah mencoba menyalurkan dana sosial yang terbagi pada beberapa kategori, dan salahsatunya dapat dimanfaatkan untuk menunjang usaha perikanan tangkap seperti memperbarui perahu, kapal motor dan peralatan penangkapan ikan lainnya, sehingga diharapkan dapat berpengaruh terhadap penghasilan yang didapatkan. Program pemberdayaan tersebut digulirkan dalam dua jenis, yaitu bantuan peningkatan produktifitas penangkapan ikan, dimulai dari bantuan motorisasi, bantuan alat penangkapan, bantuan kapal besar dan bantuan lainnya sementara jenis bantuan yang kedua dengan melakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan untuk memanfaatkan potensi pariwisata di Desa Pangandaran supaya tidak terlalu tergantung dengan melaut sehingga pada saat musim paceklik nelayan memiliki kemampuan dan keterampilan lain yang mampu menghasilkan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W., & Yulianah, Y. (2022). Corporate Social Responsibility of the Hospitality Industry in Realizing Sustainable Tourism Development. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 1610-1616
- Aidawati, R. M. (2021). Pemberdayaan Home Industri Oleh pemerintahan desa dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat di desa babakan kecamatan pangandaran kabupaten pangandaran. *Jurnal Sosial Politik*, (9).2
- Anwar, S. A. (2013). Strategi nafkah (livelihood) masyarakat pesisir berbasis modal sosial. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 13(1), 1-21.
- Arifin, Z., & Rosdakarya, P. R. (2008). *METODE PBNELITIAN*.
- Damanik, Z. A., & Amin, C. (2019). Penilaian Resiliensi Dimensi Sosial Masyarakat Kawasan Pesisir Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Berdasarkan Konsep Climate and Disaster Resilience Initiative (CDRI).
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Ilhami, R., & Achmad, W. (2022). Entrepreneurship and MSMEs during the COVID-19 Health Emergency in Indonesia. *ijd-demos*, 4(2).
- Indarti, I., & Kuntari, Y. (2015). Model Pemberdayaan sumber Daya Masyarakat Pesisir Melalui Re-Engineering Ekonomi Berbasis Koperasi Berkelanjutan.
- Juliarso, A., Djadjuli, R. D., & Risnawan, W. (2021). Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat oleh Pemerintah Desa Kecamatan Kertamukti Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 386-395.
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management).
- Kurniasari, N., & Reswati, E. (2011). Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(1), 7-13.

- Marfai, M. A., Rahayu, E., & Triyanti, A. (2018). Peran Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Pembangunan Pesisir:(Integrasi Kajian Lingkungan, Kebencanaan, dan Sosial Budaya). UGM PRESS.
- Nurhayati, A. (2012). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Tingkat Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2(2), 163-173.
- Nursetiawan, I., & Putra, R. A. K. (2021). Urgensi Penerapan Smart Governance dalam Prespektif Pelayanan Publik Di Desa Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 162-170.
- Qodriyatun, S. N. (2013). Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Batam melalui pemberdayaan masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 4(2), 91-100.
- Rachmanzah, D., Widigdo, B., & Wardiatno, Y. (2014). Kajian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berbasis pengelolaan berkelanjutan pada budidaya banden di pesisir kabupaten kawarang. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 13-27.
- Rahim, M., Tahir, M., & Rumbia, W. A. (2014). Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. *The Winners*, 15(1), 23-33.
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(3). Matthoriq, M. (2014). *Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sarinah, I., Sihabudin, A. A., & Suwarlan, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 267-277.
- Septiadi, T. A. (2019). Peran Modal Sosial dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Studi Pustaka*, 7(6).
- Sidiq, R. S. S., & Maulida, H. (2021). Exploring Health Disparities in Indigenous Akit Tribal Community in Riau Province. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(1), 47-56.
- Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17.
- Wijaya, A. A. M. (2016). Modal sosial untuk kapasitas community governance (studi kasus perempuan pesisir kelurahan sulaa kota baubau). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(1), 107-125.
- Yalia, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Studi Pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 19(1).